

# **BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

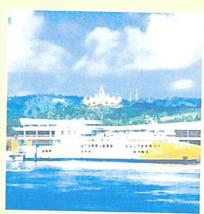


## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP) TAHUN 2023













Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tanjungkarang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2023 dan merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tahun 2020-2024

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tahun 2023 mengacu pada peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dilakukan reviu menindaklanjuti Nomor 4107/SEK/OT.01.6/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini digunakan sebagai alat penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Kinerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tahun 2023

Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melihat setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam memenuhi target yang ada sebagai media evaluasi sebagai pemicu peningkatan kinerja kedepan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan merupakan umpan balik untumendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayana Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Bandar Lampung, Januari 2024

adilan Tinggi Tanjungkarang

Dr. Heyu Pramono, S.H., M.Hum.



#### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jalan Cut Mutia No. 42, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Lampung 35214, www.pt-tanjungkarang.go.id, admin@pt-tanjungkarang.go.id

#### PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Kami telah merevieu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja . Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang disajikan secara akurat , andal dan valid

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadaan dalam informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Tanjungkarang, 29 Januari 2024

Sekretaris

Reno Sugiarto, S.H.M.H.

NIP. 1971104181997031001

Ketua

Heru Pramono , S.H.M.hum.

NIP. 196111191985121001

#### CHECKLIST REVIU

No		Pernyataan	Check List
1	Format	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	V
		LKj telah menyajikan informasi target kinerja	$\checkmark$
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	V
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung	V
		Informasi pada badan laporan	
		5. Telah menyajikan dengan upaya perbaikan ke depan	V
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	$\checkmark$
II	Mekanisme Penyusunan	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	$\checkmark$
		Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	$\checkmark$
		Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja	√
		Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	1
		LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	1
11	Substansi	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	$\checkmark$
		Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	$\sqrt{}$
		Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		Target IndikatorKinerja	V
		<ol> <li>Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target dan Indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja</li> </ol>	, √
		IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	V

Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun	V
lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	V
<ol><li>Jika " tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai</li></ol>	
11. IKU dan IK telah SMART	V

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PT. Tanjungkarang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dari pelaksanaan reviu Renstra PT Tjk tahun 2020- 2024. PT Tanjungkarang telah menetapkan 2 ( dua ) sasaran strategis, kemudian kedua sasaran strategis tersebut diukur dengan adanya 8 ( delapan ) indikator dan target kinerja. Dua sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, "berhasil" dilaksanakan dengan baik ( >100%).

Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang ada dalam perjanjian kinerja tahun 2023 "Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi "memiliki capaian > 100% paling besar diantara indkator lainya . Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja PT Tanjungkarang adalah sebesar 105,175%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut :

	Sasaran			2023	Cooper Harita	Half Sale	Capa	ian	Telephone I
No	strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaia n (%)	2022	2021	2020	2019
1 Terwujudya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	proses peradilan yang pasti,	<ol> <li>Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu</li> </ol>	93	100	107.53	105	111.1	111.1	111.1
	<ol> <li>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</li> </ol>	93	100	107.53	105	111.1	111.1	111.1	
		3. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	93	100	107.53	105	111.1	111.1	111.1
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60	50	83,3	105,08	109,3	105,8	102,4
		<ol> <li>Index responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan peradilan</li> </ol>	90	95	105,5	106	106,1	105,1	_

Rata	Rata Capai	an Kinerja Pada S	asaran St	rategis 1		NEW YORK	102,3	9	
	Sasaran	Indikator		2023	Manual Control of		Cap	aian	Gen.
No	strategi	Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	2022	2021	2020	2019
2	Peningkatan efektivitas	Persentase     salinan putusan	100	100	100	100	100	100	100

		_					أعرا	
pengelolaan penyelesaia n perkara	perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu							
	2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	100	10
	3. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	100	10

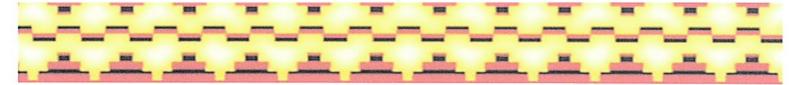
5. Checklist Reviu

### DAFTAR ISI

KATA PEI	NGANTAR	i
RINGKAS	SAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR	ISI	iii
DAFTAR '	TABEL	iv
DAFTAR	GAMBAR	v
		٠
BABI	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
	C. Struktur Organisasi	3
	D. Isu Strategis	5
	E. Sistematika Penyajian	8
DADII	DEDELLO MANAGEMENT DE LA CONTRACTOR DE L	
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024	9
	B. Rencana Kinerja Tahun 2023	11
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	15
	B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	15
	C. Realisasi Anggaran	29
DAD IV		
BAB IV	PENUTUP	32
	A. Kesimpulan	32
	B. Rekomendasi	32
LAMPIRA		
	jian Kinerja	
<ol><li>Rencar berikut</li></ol>	na Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana kinerja tahun	
	penyusunan LKjIP.	
	itaan Telah Direviu	

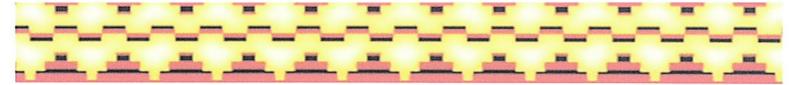
Tabel 1	Tabel Killerja Otalila dali ilidikator Killerja	10
Tabel 2	Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023	11
Tabel 3	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 4	Alokasi Anggaran Perprogram Tahun 2023	13
Tabel 5	Capaian Kinerja Tahun 2019 – 2023	14
Tabel 6	Capaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2019 - 2023	15
Tabel 7	Pengukuran Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan tepat waktu	16
Tabel 8	Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1	16
Tabel 9	Pengukuran Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan tepat waktu	17
Tabel 10	Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2	17
Tabel 11	Pengukuran Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan tepat waktu	18
Tabel 12	Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3	19
Tabel 13	Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 4	20
Tabel 14	Pengukuran persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	20
Tabel 15	Pengukuran Index Respon Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	21
Tabel 16	Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 5	21
Tabel 17	Rata rata Pengukuran Index Kepuasan Masyarakat Per Unsur	22
Tabel 18	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 tahun 2020-2023	22
Tabel 19	Capaian Sasaran 2 Indikator 1	23
Tabel 20	Realisasi Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pangedilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2019-2023	23
Tabel 21	Capaian Sasaran 2 Indikator 2	24
Tabel	Realisasi Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju	25

#### Tepat Waktu Tahun 2019-2023 22 Tabel Capaian Sasaran 2 Indikator 3 26 23 Tabel Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 26 24 Tabel Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Dipa 01 Tahun 2023 27 25 Tabel Realisasi Anggaran DIPA 03 28 26 Tabel Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara 28 27 Tabel Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara 29 28 Tabel Laporan Keadaan Perkara Perdata tahun 2023 29 29 Tabel Laporan Keuangan Perkara Perdata tahun 2023 30 30 Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2021 Yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja 30 31



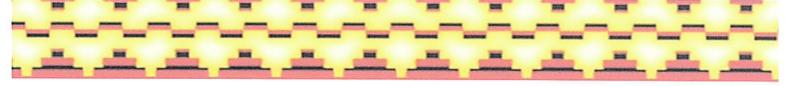
### **DAFTAR GAMBAR**

STRUKTUR ORGANISASASI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG	3
KEGIATAN FGD TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERADILAN SE-WILAYAH	4
HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG	
PENYERAHAN ANUGRAH KETUA MAHKAMAH AGUNG KEPADA	4
PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI	
TANJUNGKARANG	
PEMBINAAN TEKNIS SECARA VIRTUAL OLEH PIMPINAN MAHKAMAH	4
AGUNG RI	
EVALUASI KINERJA APM OLEH BADILUM MA RI	5
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS KETUA PENGADILAN	5
TINGGI	
PELATIHAN MOTIVATION AND INSPIRATION	5
AUDIENSI KAKANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI LAMPUNG	5
BIMBINGAN TEKNIS KEKAYAAN INTELEKTUAL MAHKAMAH AGUNG	5
	KEGIATAN FGD TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERADILAN SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG PENYERAHAN ANUGRAH KETUA MAHKAMAH AGUNG KEPADA PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG PEMBINAAN TEKNIS SECARA VIRTUAL OLEH PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI EVALUASI KINERJA APM OLEH BADILUM MA RI PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS KETUA PENGADILAN TINGGI PELATIHAN MOTIVATION AND INSPIRATION AUDIENSI KAKANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI LAMPUNG



### **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA PERDATA TEPAT WAKTU	17
Grafik 2	PERSENTASE PENYELESAIAN PIDANA PERDATA TEPAT WAKTU	18
Grafik 3	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS TEPAT	19
	WAKTU	



#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang dibentuk berdasarkan Undang - undang Nomor 9 tahun 1980 merupakan kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 11 (Sebelas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang meliputi:

- 1. Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA
- 2. Pengadilan Negeri Metro Kelas IB
- 3. Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas IB
- 4. Pengadilan Negeri Kotabumi Kelas II
- 5. Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB
- 6. Pengadilan Negeri Menggala Kelas II
- 7. Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II
- 8. Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II
- 9. Pengadilan Negeri Liwa II
- 10. Pengadilan Negeri Blambangan Umpu II
- 11. Pengadilan Negeri Gedong Tataan II

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam melaksanakan tugas pokoknya dituntut untuk transparan akuntabel, efektif dan efisien, sebagaimana dengan prinsip good governance yang tertuang dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai bagian dari peradilan umum , Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Mahkamah Agung dan administrasi berada di bawah Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat banding.

Salah satu azas Good Governance adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Wujud dari pelaksanaan akuntabilitas tersebut adalah adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama selama tahun 2023. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

#### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku salah kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan:

- Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding (pasal 51 ayat 1 Undang - undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009)
- Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya (pasal 51 ayat 2 Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua Undang undang Nomor 40 tahun 2009)
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. (pasal 52 ayat 1 Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua Undang undang Nomor 40 tahun 2009)
- 4. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. (pasal 52 ayat 2 Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua Undang undang Nomor 40 tahun 2009)

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai 5 ( lima ) fungsi, yaitu:

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power)

yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.

2. Fungsi pembinaan

yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kepegawaian.

3. Fungsi Pengawasan

yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan tingkah laku hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dansewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.

4. Fungsi Nasihat

yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukum apabila diminta.

#### 5. Fungsi Administrasi

yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

#### C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan sebagai berikut.

PANITERA WAKIL KETUA

PANITERA SEKRETARIS

PANITERA MUDA PANITERA MUDA PANITERA MUDA PANITERA MUDA PERIOANA DAN PERIOANAN PENINANAN PENINANANAN PENINANAN PENINANAN PENINANAN PENINANAN PENINANAN PENINANANAN PENINANAN PENINANANAN PENINANAN PENINA

Gambar 1. Struktur Organisasasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Organisasi dan tata kerja Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai berikut :

#### 1. Ketua Pengadilan

- Ketua Pengadilan sebagai pimpinan pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan
- Menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal hal yang berhubungan dengan pengadilan

#### 2. Wakil Ketua

Melaksanakan tugas ketua pengadilan apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan ketua kepadanya

#### 3. Hakim Tinggi

- Menetapkan hari sidang
- Memeriksa dan mengadili perkara yang diberikan
- Melaksanakan Pengawasan daerah
- Melaksanakan Pengawasan bidang

#### 4. Panitera

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat- surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terdiri dari

Panitera Muda Perdata melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata

- Panitera Muda Pidana melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana
- Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara kusus seperti perkara tindak pidana korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Panitera Muda Hukum melaksanakan pengumpulan pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan

#### 5. Panitera Pengganti

Mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan serta bertugas membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang , membuat penetapan terdakwa tetap ditahan , dan dikeluarkan dari tahanan

#### 6. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terdiri atas

# Bagian Perencanaan dan Kepegawaian melaksanakan urusan perencanaan, program anggaran, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan TI

#### Bagian Umum dan Keuangan

melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, kelengkapan, Rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan

Bagian Perencanaan dan kepegawaian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terdiri atas:

#### a. Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

#### b. Sub Bagian Kepegawaian dan TI

melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan TI, dan ststistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

### Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terdiri:

#### a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

#### b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 1. Pranata Komputer

melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana TI, Infrastruktur TI serta Sistem Informasi dan Multimedia.



#### 2. Analisis Kepegawaian Pertama

melaksanakan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan Sisitem Manajemen PNS.

#### D. ISU STRATEGIS

Isu strategi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kurun waktu 2023 adalah sebagai berikut :

#### 1. Menjaga Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada Desember 2020 mendapatkan predikat WBBM, meraih predikat WBBM bukanlah akhir dari perjuangan Pembangunan Zona Integritas. Hal ini justru merupakan tahap pembuktian komitmen perubahan dan peningkatan kinerja yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan . Sebagai bentuk menjaga predikat WBBM tersebut dalam kurun waktu tahun 2023, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melibatkan semua unsur yang ada agar mempertahankan Zona Integritas, memperketat pengawasan, menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan melalui monitoring dan evaluasi pada masing masing area Pembangunan Zona Integritas, apapun temuan yang ada telah ditindak lanjuti.

### PERISTIWA PENTING 2023

#### PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG



### KEGIATAN FGD TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERADILAN SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG ( Gambar.1 )

BANDAR LAMPUNG | Sebanyak 100 Peserta yang merupakan Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Panitera Pengadilan Negeri, dan Sekretaris Pengadilan Negeri dari Peradilan Umum di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengikuti Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Teknis dan Administrasi Peradilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Kegiatan tersebut diselenggarakan selama 1 hari tanggal 5 Oktober 2023 bertempat di Ball Room Hotel Golden Tulip Bandar Lampung.



#### PENYERAHAN ANUGRAH KETUA MAHKAMAH AGUNG KEPADA PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG ( Gambar.2 )

Bandar Lampung: 29/08/2023 bertempat di Ruang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dilakukan penyerahan Anugrah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang H. Suwidya, S.H., LL.M., kepada pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadian Tinggi Tanjungkarang.



### PEMBINAAN TEKNIS SECARA VIRTUAL OLEH PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI ( Gambar.3 )

BANDAR LAMPUNG | Kamis, 6 Juli 2023 Bertempat di ruang Auditorium Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan secara virtual. Kegiatan tersebut disiarkan langsung melalui aplikasi zoom meeting yang betempat di Hotel Four Points Sheraton kota Makassar.



#### **EVALUASI KINERJA APM OLEH BADILUM MA RI ( Gambar.4 )**

BANDAR LAMPUNG | Selasa, 21 Maret 2023 Tim dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI melaksanakan evaluasi kinerja Akreditasi Penjaminan Mutu dan kesiapan satker dalam mempersiapkan Zona Integritas dalam predikat WBK dan WBBM.

Tabel 1. Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ol> <li>Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</li> <li>Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan</li> </ol>
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu     Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program Mahkamah Agung yaitu:

#### 1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan tugas pokok pengadilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

- Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
- Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu dan akuntabel

#### Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategi sebagai berikut:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan public atas layanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

#### 2. Program Dukungan Management

Program Dukungan Management ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan sasaran program sebagai berikut

- Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang secara optimal
- Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

#### Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis sebagai berikut:

 Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga tehnis di lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang





### PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS KETUA PENGADILAN TINGGI ( Gambar.5 )

BANDAR LAMPUNG | Kamis, 12 Januari 2023 Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Dr. mochamad Djoko, SH.,M.Hum mengikuti acara penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan secara virtual dari Mahkamah Agung RI. Acara diikuti oleh seluruh Ketua Pengadilan Tinggi di berbagai Wilayah di Indonesia.



#### PELATIHAN MOTIVATION AND INSPIRATION (Gambar.6)

BANDAR LAMPUNG | Selasa, 10 Januari 2023 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) mengadakan Pelatihan Motivation and Inspiration bertempat di ruang Auditorium Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.



#### AUDIENSI KAKANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI LAMPUNG

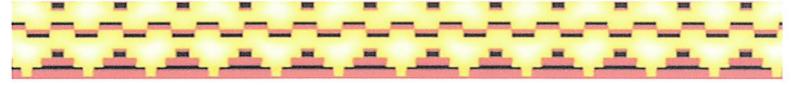
#### (Gambar.7)

BANDAR LAMPUNG | Kamis, 05 Januari 2023 Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Dr. Mochamad Djoko, SH.,M.Hum didampingi Hakim Tinggi Bapak Abdul Siboro, SH.,MH menyambut kedatangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Drm Sorta Delima Tobing, SH.,M.Si beserta rombongan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam rangka Audiensi untuk memperkuat sinergitas antar instansi.



### BIMBINGAN TEKNIS KEKAYAAN INTELEKTUAL MAHKAMAH AGUNG DAN JICA ( Gambar.8 )

BANDAR LAMPUNG | Sebanyak 30 Peserta yang merupakan Hakim dari Peradilan Umum di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kekayaan Intelektual yang diadakan oleh JICA (Japan International Cooperation Agency) bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI. Kegiatan tersebut diselenggarakan selama 4 hari tanggal 4-7 September 2023 bertempat di Hotel Sheraton Bandar Lampung.



#### E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tahun 2023 sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, tugas, pokok fungsi dan wewenang, struktur organisasi, isu strategi dan sistematika penyajian.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategi 2020 – 2024. Rencana kinerja tahun 2023 dan perjanjian kinerja tahun 2023

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang beserta analisisnya dan penggunaan anggaran untuk mewujudkan kinerja ersebut sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada Bab ini mencantumkan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan langkah langkah yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja

#### Lampiran:

- 6. Perjanjian Kinerja
- 7. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana kinerja tahun berikutnya
- 8. SK Tim penyusunan LKjIP.
- 9. Pernyataan Telah Direviu
- 10. Checklist Reviu

#### BAB II

#### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020 – 2024. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kerangka pendanaan. Dalam pelaksanaannya, RENSTRA Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan mengalami revisi sejalan dengan adanya perubahan internal ataupun eksternal.

Rencana kerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang merupakan penjabaran dari Renstra merupakan awal dari rangkaian kegiatan kerja yang pelaksanaannya tidak lepas dari semangat visi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yaitu "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang Agung"

Visi ini mencerminkan cita — cita dan harapan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai lembaga pradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menetapkan misi sebagai berikut:

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan Tinggi Tanjungkarang

<u>Tujuan Strategis</u> merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang merumuskan tujuan strategis untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis ditetapkan berdasarkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

### Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
- 2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang agung, maka **Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerapkan sasaran strategis sebagai berikut:** 

- 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran strategi tersebut dijabarkan dalam kinerja utama dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ol> <li>Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</li> <li>Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan</li> </ol>
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara	<ol> <li>Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu</li> <li>Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu</li> </ol>

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program Mahkamah Agung yaitu:

#### 1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan tugas pokok pengadilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

- Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
- Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu dan akuntabel

### Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategi sebagai berikut:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan public atas layanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

#### 2. Program Dukungan Management

Program Dukungan Management ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang **dengan sasaran program sebagai berikut** 

- Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang secara optimal
- Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

### Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis sebagai berikut:

 Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga tehnis di lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

- Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi
  - Meningkatnya transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan asset

#### B. Rencana Kinerja Tahun

Tanjungkarang

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 2. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang	1.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat watu	93 %
	Pasti, Transparan, dan Akuntabel	2.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93 %
		3.	Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	93 %
		4.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %
		5.	Index persepsi stakeholder yang puas tehadap layanan peradilan	95 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %
	Penyelesaian Perkara	2.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100 %

#### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Di awal tahun 2023, Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Dirjen Badan Peradilan Umum, terdapat 2 (dua) sasaran Strategis dan 7 ( tujuh ) Indikator Kinerja, namun setelah adanya perubahan mengenai Penetapan Indkator Kinerja Utama ( IKU ) melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 maka perjanjian kinerja tahun 2023 memiliki 2 ( dua ) sasaran strategis dan 7 ( tujuh ) indikator kinerja seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang	1.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat watu	93 %
	Pasti, Transparan, dan Akuntabel	2.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93 %
		3.	Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	93 %
		4.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %
		5.	Index persepsi stakeholder yang puas tehadap layanan peradilan	95 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %
	Penyelesaian Perkara	2.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100 %

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan	Rp.	30.689.272.611
	Urusan Administrasi		
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah	Rp.	86.000.000
	Agung		
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	254.277.999

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mendapatkan anggaran (DIPA 01 dan DIPA 03) dengan total pagu adalah Rp. 31.114.286.611,- dan mengalami penyesuaian anggaran sebesar Rp. 236.000.000 untuk DIPA 01 dan Rp. 236.000.000 DIPA 03 (Rupiah Murni) Rp. 254.277.999 DIPA 03 (PNBP) sehingga total pagu menjadi Rp. 31.114.286.611 digambarkan dalam tabel berikut, sehingga rincian alokasi anggaran perprogram tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Anggaran Perprogram Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)
1	Penegakan dan Pelayanan Hukum	254.277.999
2	Dukungan Manajemen	30.775.276.611
	Jumlah	31.114.286.611

#### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### B. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mengukur akuntabilitas kinerja. Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (capaian = realisasi/target x 100%). Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tahun 2023 adalah rata rata sebesar 107,53% secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tahun 2023 telah tercapai. Adapun capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang 2019 – 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2019 - 2023

N	Cacaran		/	2023			Сар	aian	
0	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	2022	2021	2020	2019
1	Terwujudya proses peradilan yang pasti,	Persentase     perkara perdata     yang diselesaikan     tepat waktu	93	100	107,53	105	111,1	111,1	111,1
	transparan dan akuntabel	Persentase     perkara pidana     yang diselesaikan     tepat waktu	93	100	107,53	100,08	111,1	111,1	111,1
		3. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	93	100	107,53	-	105,3	105,3	105,3
		<ol> <li>Persentase         perkara yang         tidak mengajukan         upaya hukum         kasasi</li> </ol>	60	50	83,33	105	73,8	74,2	110,2
		<ol> <li>Index responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap peradilan tingkatk banding</li> </ol>	90	95,5	106,1	106	106,1	105.1	٠
Rata	rata capaian kir	nerja pada sasaran st	rategis 1		102,3	9			
	1	T		2023			Car	aian	
No	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	2022	2021	2020	2019
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan	100	100	100	100	100	100	100

		L							-	 -
				pengaju tepat waktu						
-	Rata ra	ta ca	paian kiner	ja pada sasara	an strategis	2			100	-
L	Rata rat	ta cap	aian kinerja I	Pengadilan Ting	gi Tanjungka	rang Tahun 20	019-2023	1	101,195	

#### C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berikut ini analisis hasil capaian kinerja pada 2 (dua) sasaran strategis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### Sasaran I Terwujudnya proses peradilan yang yang pasti,transparan dan akuntabel.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 7 (tujuh) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2019 - 2023

				2023			Cap	aian	
		Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	2022	2021	2020	2019
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	93	100	107,53	105	111,1	111,1	111,1
	Sasaran	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93	100	107,53	100,08	111,1	111,1	111,1
No	strategi	Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	93	100	107,53		105,3	105,3	105,3
		<ol> <li>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</li> </ol>	60	50	83,33	105	73,8	74,2	110,2
		5. Index responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap peradilan tingkat banding	90	95,5	106,1	106	106,1	105.1	-
Rata	Rata Capai	an Kinerja Pada Sasaran I			102,39				

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing masing indikator kinerja sasaran strategis I tahun 2023 sebagai berikut:

### Indikator 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja "persentase perkara perdata yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan, input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2024 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding ( empat )

lingkungan peradilan , yaitu maksimal 3 ( tiga ) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding

Pada tahun 2023 realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100 % karena jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 114 perkara

Realisasi indikator ini sangat baik dan mencapai persentase melebihi target 93% sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan capaian 102.39 %

Tabel 7. Pengukuran Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan tepat waktu

No	Bulan	Perkara Perdata yang masuk tahun 2022	Perkara perdata yang putus tepat waktu tahun 2022	Realisasi persentase perkara perdata yang putus tepat waktu
1	Januari	9	9	100 %
2	Februari	14	14	100 %
3	Maret	11	11	100 %
4	April	5	5	100 %
5	Mei	8	8	100 %
6	Juni	5	5	100 %
7	Juli	5	5	100 %
8	Agustus	13	13	100 %
9	September	8	8	100 %
10	Oktober	15	15	100 %
11	November	9	9	100 %
12	Desember	12	12	100 %
	Jumlah	114	114	100 %

Rincian capaian penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1

Tahun	Jumlah perkara perdata	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu (%)	Capaian
2023	107	114	93%	106.5%	107,53%
2022	112	106	90%	94%	105%
2021	106	103	90%	97%	111%
2020	102	106	90%	103.9%	105.87%
2019	116	123	90%	106%	109.31%

#### Analisis dari tabel diatas adalah:

- Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah 100%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 100%. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023
- Bila dibandingkan realisasi dan capaian selama tahun 2019 2023 yang selalu mencapai target maka dapat disimpulkan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selalu

- berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan perkara di tahun sebelumnya agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya
- Keberhasilan pencapaian target tersebut adalah komitmen Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 tahun 2014, dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan Tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, kemudian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerapkan SOP penyelesaian perkara perdata dengan baik.



Grafik 1. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu Tahun 2019-2023

#### Indikator 2. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang harus diselesaikan tahun berjalan.

Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Pada tahun 2023 indikator persentase perkara pidana yang diselesakan tepat waktu memiliki capaian sebesar 107,53. Capaian indikator ini sangat baik karena dapat melebihi target. Realisasi penyelesaian perkara pidana tepat waktu adalah 100 %

Tabel berikut menunjukkan setiap tahun Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 9. Pengukuran Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan tepat waktu

No	Bulan	Perkara Pidana yang	Perkara Pidana	Realisasi persentase
		masuk tahun 2023	putus tepat	perkara pidana yang
			waktu tahun	putus tepat waktu
			2023	
1	Januari	44	44	100 %
2	Februari	34	34	100 %
3	Maret	21	21	100 %
4	April	18	18	100 %
5	Mei	41	41	100 %
6	Juni	15	15	100 %
7	Juli	35	35	100 %
8	Agustus	36	36	100 %
9	September	36	36	100 %
10	Oktober	47	47	100 %
11	November	33	33	100 %
12	Desember	26	26	100 %
	Jumlah	386	386	100 %

Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase perkara pidana yang	2023	100	100	100
diselesaikan tepat waktu	2022	100	100	100
	2021	100	100	100
	2020	100	100	100
	2019	100	100	100

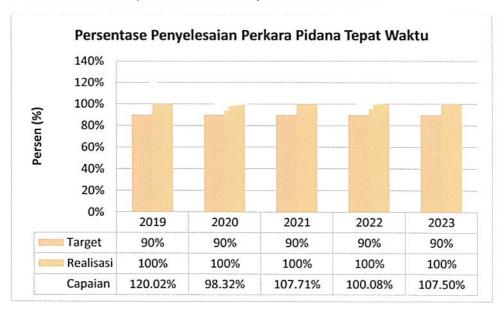
Rincian capaian penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2

Tahun	Perkara pidana yang masuk tahun	Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi penyelesaian perkara pidana (%)	Capaian
2023	386	386	90%	100%	107,5 %
2022	227	227	90%	100%	100,08%
2021	222	222	90%	100%	107,71%
2020	200	200	90%	100%	98,32%
2019	187	187	90%	100%	120.02%

Analisis dari tabel diatas adalah

- Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan adalah 100%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 100%. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023
- Bila dibandingkan realisasi dan capaian selama tahun 2019 2023 yang selalu mencapai target 100%, maka dapat disimpulkan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selalu berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan perkara secara tepat waktu
- Keberhasilan pencapaian target tersebut dalah komitmen Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam menerpakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan Tingkat Banding secara tepat waktu demi tercapainya sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntable pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
- Adanya komunikasi dan koordinasi antara majelis hakim, panitera penggantu dan bagian kepaniteraan secara berkala serta dimonitoring oleh hakim pengawas dan pimpinan tertinggi melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala
- Adanya reward dan punishment terhadap penyelesaian sisa perkara dan yang tepat waktu dan yang terlambat agar menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja
- Grafik 2. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2019-2023



Indikator 3. Indikator 3. Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan dengan jumlah perkara pidana khusus yang harus diselesaikan tepat waktu.

Tabel berikut menunjukkan setiap tahun Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara pidana khusus tipikor yang diselesaikan

Tabel 11. Pengukuran Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase perkara pidana khusus yang	2023	100	100	100
diselesaikan tepat waktu	2022	100	100	100
	2021	100	100	100
	2020	100	100	100
	2019	100	100	100

Rincian capaian penyelesaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 12. Persentase Perkara Pidana Tipikor Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2023

No	Bulan	Perkara Pidana khusus yang masuk tahun 2023	Perkara Pidana khusus yang putus tepat waktu tahun 2023	Realisasi persentase perkara pidana yang putus tepat waktu
1	Januari	1	1	100 %
2	Februari	*	-	100 %
3	Maret	1	1	100 %
4	April	-	( <u>-</u> )	100 %
5	Mei	2	2	100 %
6	Juni	4	4	100 %
7	Juli		-	100 %
8	Agustus	1	1	100 %
9	September		851	100 %
10	Oktober	3	3	100 %
11	November	4	4	100 %
12	Desember	3	3	100 %
	Jumlah	18	18	100 %

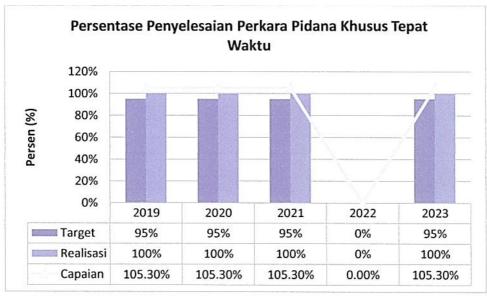
Tabel 13. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3

Tahun	Perkara pidana tipikor yang diselesaikan setiap tahun	Perkara pidana tipikor yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi %	Capaian %	
2023	19	19	95	100	105,3	
2022	-	-	-	-	-	
2021	17	17	95	100	105,3	
2020	3	3	95	100	105,3	
2019	6	6	95	100	105,3	

#### Analisis dari tabel diatas adalah:

- Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indikator persentase perkara pidana tipikor yang diselesaikan tepat waktu adalah 95%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 100%. Ini berarti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023
- Bila dibandingkan dari tahun 2019 2023 dapat dilihat bahwa pencapaian selama kurun waktu tersebut selalu diatas 100%
- Keberhasilan pencapaian target tersebut adalah
  - Komitmen Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalama menerapkan SEMA No 2 Tahun 2004
  - 2. Penerapan SOP penyelesaian perkara pidana tipikor dengan baik
  - 3. Atasan langsung rutin melakukan monev SIPP
  - 4. Hakim Pengawas Bidang pidana tipikor setiap bulan melakukan monev SIPP dan hasil monev tersebut disampaikan saat rapat bulanan

Grafik 3. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Tepat Waktu Tahun 2019-2023



- · Keberhasilan pencapaian target tersebut adalah
  - Komitmen Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalama menerapkan SEMA No 2 Tahun 2004
  - 2. Penerapan SOP penyelesaian perkara pidana dengan baik

- - 3. Atasan langsung rutin melakukan monev SIPP
  - 4. Hakim Pengawas Bidang pidana setiap bulan melakukan monev SIPP dan hasil monev tersebut disampaikan saat rapat bulanan

#### Indikator 4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan di Tingkat Banding.

Pada tahun 2023 realisasi dan capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 14. Pengukuran Persentase Perkara	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
---	--

Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak	2023	63	50	83
mengajukan upaya hukum kasasi	2022	63	60	105
	2021	36,9	50	65.9
	2020	37,1	50	160.69
	2019	52,9	48	108.16

Capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023 mencapai 83 %

Analisis dari tabel diatas adalah

- Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 60%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 50%. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023
- Bila dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi menurun sebesar 47.53% dan capaian kinerja menurun sebesar 94.79%, dengan target yang sama yaitu 50%. Akan tetapi capaian yang didapat pada tahun 2023 sudah melebihi target yang diperjanjikan pda perjanjian kinerja tahun 2023
- Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan pihak yang berperkara belum merasa puas terhadap putusan yang dibuat

## Indikator 5. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi

Indikator Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding adalah perbandingan jumlah responden peradilan tingkat pertama.

Pengukuran indikator ini menggunakan Permenpan No 14 tahun 2017 tentang survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public. Survey index kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama dilaksanakan pada bulan Desember 2023. Responden yang dipilih berjumlah 129 orang. Populasi penelitian ini adalah

Metode survey ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka angka dan dianalisis dengan tehnik analisis statistic kuantitatif sebagai pelengkap.

para PNS di setiap Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Sampel pada penelitian ini diambil dengan tehnik Simple Random

Tabel 15. Pengukuran Index Respon Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi

Indikator Kinerja	Tahun	Relisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama	2022	100	90	106,2%
yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	2023	100	95	105,1%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi sebesar **105.1%** 

Ruang lingkup survey kepuasan meliputi:

#### 1. Persyaratan Pelayanan

adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi.

#### 2. Prosedur

Sampling

adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan

#### 3. Waktu pelayanan

adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses dari setiap jenis pelayanan

#### 4. Biaya/tarif

adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar Penyelenggara dan Masyarakat

#### 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan

#### 6. Kompetensi Pelaksana

adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman

#### 7. Perilaku Pelaksana

adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

#### 8. Sarana dan Prasarana

yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak

 Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

Dengan hasil survey pada tabel dibawah ini:

Tabel 16. Pengukuran Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Tahun 2023

Indikator Kerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang	2023	95	100	105,2%
puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding	2022	89%	94,5%	106,2%

Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023

PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG
NILAI INDEKS
3,84 / 95,91 %
Periode 1 April 2023 sampai 30 Juni 2023

Peniode 1 Juli 2023 sampai 30 September 2023

PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG
NILAI INDEKS
3,88 / 96,96 %
Periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023

Tabel 17. Rata rata Pengukuran Index Kepuasan Masyarakat Per Unsur

No	Indikator	Nilai TW I	Nilai TW II	Nilai TW III	Nilai TW IV	Nilai Rata – Rata
U1	Persyaratan	4.00	3.83	3.96	3.86	3,91
U2	Prosedur	4.00	3.81	3.97	3.85	3,90
U3	Waktu Pelayanan	4.00	3.82	3.96	3.86	3,91
U4	Biaya/ Tarif	4.00	3.80	3.96	3.87	3,90
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4.00	3.82	3.96	3.87	3,91
U6 Kompetensi Pelaksanaan		4.00	3.81	3.96	3.87	3,91
U7 Perilaku Pelaksanaan		4.00	3.81	3.96	3.86	3,90
U8	Sarana dan Prasarana	4.00	3.82	3.96	3.87	3,91

U9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	4.00	4.00	4.00	3.96	3,99
	IKM unit pelayanan	100	95.91	99.22	96.96	98,02

- Target tahun 2023 yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk indikator index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan peradilan Tingkat Banding sebesar 89%. Realisasi pada indikator tersebut sebesar 94,5%. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Tanjunkarang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
- Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi kenaikan capaian 2,3%
- Berdasarkan hasil perhitungan index kepuasan pengadilan tingkat pertama terhadap pengadilan tinggi, berikut ini dijelaskan monev dari 3 (tiga) nilai terendah:
  - Perilaku pelaksana, dengan meminta bantuan Bank Rakyat Indonesia, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengadakan Bimtek terhadap petugas PTSP agar perilaku petugas dalam melayani semakin optimal.
  - 2. **Waktu Pelayanan** atau Penyelesaian pekerjaan yang memakan waktu lama agar dipercepat dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan
  - Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masih kurang, tetapi dengan Sarana dan Prasarana yang ada tetap penggunaannya di optimalkan, dirawat dan diperbaiki, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna pengadilan

#### Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara II

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam meningkatkan efektifitas pengluaran perkara.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan Indikator sebagai berikut :

- 1. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- 2. Persentase Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- 3. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus

Rata rata capaian sasaran ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Seluruh indikator pada sasaran ini mencapai target 100%. Rincian capaian strategi tahun 2019 – 2023 untuk setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 18. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Startegis 2 tahun 2019 - 2023

Sasaran	Indikator		2023			Cap	aian		
No	Strategi	Kinerja	Target (%)	Realisa si (%)	Capaia n (%)	2023	2022	2021	2020

		100			A STANSON	No. Appendix		COMMENT D	Later moved	\$500 PM
1	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara	a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
		b.	Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
	Rata Rata Capa	aian	ı Kinerja Pada Sa	saran Starte	gis 2	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran dari tahun 2020 – 2023 selalu tetap. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selalu efektif.

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing masing Indikator kinerja sasaran 2 tahun 2023.

#### Indikator 1 Persentase Salinan Putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada Pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus.

Pada Tahun 2023 Indikator ini mencapai target 100%, karena seluruh salinan putusan dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu, mengacu pada SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Salinan Putusan dikirim untuk para Pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 19. Capaian Sasaran 2 Indikator 1

Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase salinan putusan perkara	2023	100	100	100
perdata yang dikirim ke pangadilan	2022	100	100	100
pengaju tepat waktu	2021	100	100	100
	2020	100	100	100
	2019	100	100	100



Tabel 20. Realisasi Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pangedilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2019-2023

Tahun	Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Jumlah perkara perdata diputus	realisasi
2023	114	114	100%
2022	106	106	100%
2021	103	103	100%
2020	106	106	100%
2019	123	123	100%

Jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2023 sebanyak 114 perkara dan seluruh salinan putusan perkara perdata tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, umunya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang langsung mengirim salinan putusan perkara perdata selalu tepat waktu

Analisa yang dapat diambil pada tabel diatas adalah:

- Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut sebesar 100%. Ini berarti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023
- Bila dibandingkan realisasi dan capaian selam tahun 2019 2023 nilai realisasi dan capaian selalu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.
   Hal ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam mengirim putusan ke pengadilan pengaju.
- Keberhasilan pencapaian target tersebut adalah komitmen Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam menerapkan SEMA No 1 Yahun 2011, kemudian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang juga menerapkan SOP dengan baik serta kualitas SDM dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tanggung jawab.

#### Indikator 2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kerja persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan Jumlah Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana.

Pada tahun 2023, indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan perkara pidana dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu, mengacu pada SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 tahun 2010 tentang penyelesaian salinan dan petikan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 21. Capaian Sasaran 2 Indikator 2

Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase salinan putusan perkara	2023	100	100	100
pidana yang dikirim ke pangadilan	2022	100	100	100
pengaju tepat waktu	2021	100	100	100
	2020	100	100	100
	2019	100	100	100

Tabel 22. Realisasi Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2019-2023

Tahun	Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Jumlah perkara perdata diputus	Realisasi
2023	386	386	100%
2022	223	223	100%
2021	229	229	100%
2020	226	226	100%
2019	202	202	100%

Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2023 sebanyak 386 perkara dan seluruh salinan putusan perkara pidaana tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Umumnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang langsung mengirim salinan putusan perkara pidana selalu tepat waktu

Analisa yang dapat diambil pada tabel diatas adalah:

- Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut sebesar 100%. Ini berarti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023
- Bila dibandingkan realisasi dan capaian selama tahun 2019 2023 nilai realisasi dan capaian selalu mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam mengirim putusan ke pengadilan pengaju
- Keberhasilan pencapaian target tersebut adalah komitmen Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011, kemudian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang juga menerapkan SOP dengan baik serta kualitas SDM dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tanggung jawab

#### Indikator3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana khusus Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana kusus. Pada tahun 2023 jumlah putusan pidana khusus sebanyak 19 perkara , sebanyak 19 salinan putusan perkara pidana dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Seperti perkara perdata pengiriman petikan putusan perkara pidana khusus ke pengadilan pengaju juga dikirimkan melalui email

atau melalui email atau melalui ekspedisi setelah perkara diputus, dan salinan

atau melalui email atau melalui ekspedisi setelah perkara diputus, dan salinan putusan dikirim ke Pengadilan pengaju paling lama 14 (empat belas) hari.

Tabel 22. Capaian Sasaran 2 Indikator 3

Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase salinan putusan perkara	2023	100	100	100
pidana khusus yang dikirim ke	2022	100	100	100
pengadilan pengaju tepat waktu	2021	100	100	100
	2020	100	100	100
	2019	100	100	100

#### D. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mendapat total alokasi anggaran sebagai berikut :

- DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 30.775.272.611
- DIPA 03 (Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI) sebesar Rp 254.277.988

Tabel 23. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran	%
1	Program dukungan Manajemen	30.933.262.000	30.775.272.611	99.49	622.804	0.51
2	Program Penegakan dan pelayanan hukum	256.240.000	254.277.988	99.23	1.962.012	0.77
Jumla	ah	31.189.502.000	31.029.550.599		2.584.819	

#### DIPA 01

DIPA 01 BUA digunakan untuk melaksanakan program dukungan manajemen. Program ini mempunyai 2 kegiatan yaitu :

- ~ (1066) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan BUA
- ~ (1071) Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selama tahun 2023 telah direvisi sebanyak 17 kali

Tabel 24. Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Dipa 01 Tahun 2023

Jenis belanja	Pagu %	Realisasi (%)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai	26.979.497.000	26.826.384.238	153.112.726	99.43
Belanja Barang	3.781.080.000	3.777.217.123	3.862.877	99.90
Belanja Modal	86.000.000	86.000.000	86.000.000	100.00

#### DIPA 03

DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum digunakan untuk program penegakan dan pelayanan hukum. Program ini mempunyai kegiatan untuk meningkatkan manajemen Peradilan Umum

Anggaran DIPA 03 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selama tahun 2023 telah direvisi sebanyak 8 kali

Tabel 25. Realisasi Anggaran DIPA 03

Jenis belanja	Pagu %	Realisasi (%)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Barang	256.240.000	254.277.988	1.962.012	99.23

Tabel 26. Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara

No	Uraian	Volume	Realisasi
1	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat banding	386 perkara	386
2	Perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat banding	19 perkara	19
Total		405 perkara	405

Tabel 27. Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat banding	114.400.000	110.306.626	96	4.093.374
2	Perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat banding	41.800.000	41.158.584	98	641.416
	Total	156.200.000	151.465.210	97	4.734.790

#### Informasi Keuangan Perkara Perdata yang dibiayai oleh para Pihak

Tabel 28. Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2023

tus 2023 Sisa 2023
114 0

Tabel 29. Laporan Keuangan Perkara Perdata tahun 2023

Uraian	Saldo Awal Januari 2023	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Aktif (Saldo awal Penerimaan - Pengeluaran
Biaya Perkara	900.000	Rp 150.000 x 106 berkas = 15.900.000	Rp. 150.000 x 103 berkas = 15.450.000	Rp. 450.000

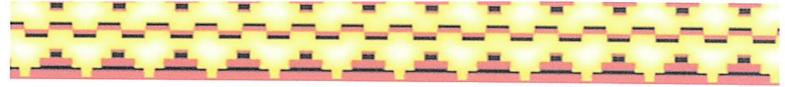


Adapun rincian Biaya pengeluaran sebesar Rp 150.000.000 adalah sebagai berikut :

Biaya Pemberkasan = Rp 130.000 Biaya Materai = Rp 10.000 Biaya Redaksi = Rp 10.000

Tabel 30. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja

N o	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Program	Sumber anggaran	Pagu Anggaran	Realisas	i
						Rp	%
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, tansparan dan akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu 4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 5. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	Program: Dukungan manajemen Kegiatan: - Pembinaan Adm Dan Pengelolaan Keu Bua - Pengadaan Sapras Dilingkunga n MA	DIPA 01 BUA	30.933.262.000	30.775.272.611	99.49
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul> <li>6. Persentase     Salinan Putusan     Perkara Perdata     yang Dikirim ke     Pengadilan     Pengaju tepat     waktu</li> <li>7. Persentase     Salinan Putusan     Perkara Pidana     yang Dikirim ke     Pengadilan     Pengaju Tepat     Waktu</li> </ul>		DIPA 03 Dirjen Badilum	256.240.000	254.277.988	99.23



#### **BAB IV**

#### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Tahun 2023 mencantumkan 2 (dua) sasaran Strategis dimana Sasaran Strategis 1 yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, menggunakan alat ukur 8 (delapan) Indikator. Kemudian sasaran strategis 2 yaitu peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara menggunakan alat ukur 2 (dua) indikator. Rata-rata capaian seluruh Indikator kinerja tersebut dinyatakan baik karena memperoleh rata-rata capaian.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan "Berhasil" karena capaian sasaran tahun 2023 menunjukkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dudah dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan tersebut didukung oleh:

- Fungsi Pengawas Bidang dan Asesmen Internal yang dilaksanakan secara berkala
- ~ Monitoring dan evaluasi dari atasan langsung
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Teknis atau non teknis melalui pagu anggaran DIPA 01 dan DIPA 03
- ~ Adanya kebijakan Internal Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi
- ~ Adanya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kerja

#### B. REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang harus berupaya:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
- b. Penguatan kualitas SDM agar menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat
- c. Penguatan pengawasan internal dan eksternal
- d. Monitoring dan evaluasi Pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok
- e. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana serta kualtas lingkungan kerja

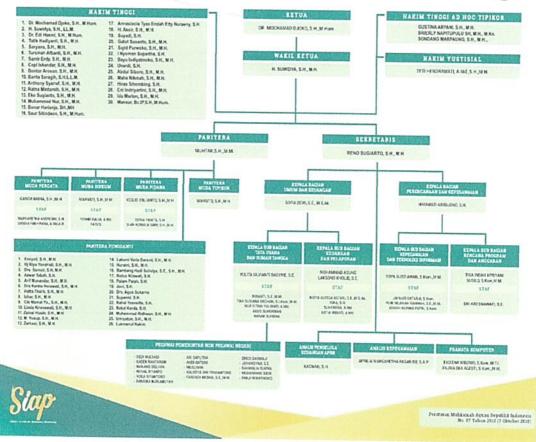
# LAMPIRAN - LAMPIRAN

# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG



#### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG





# SK TIM PENYUSUNAN LKJiP TAHUN 2024



#### PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG Nomor: 49 /KPT.W9-U/SK.OT1.6/I/2024

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

#### TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

#### KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas:
  - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Ri Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  - 7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
  - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
  - 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

SURAT KEPUTUSAN	
-----------------	--

- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku l pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian laporan Pelaksanaan Kegiatan);
- 15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 16. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 17. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya;

#### MEMUTUSKAN

	MEMOTOSKAN
Menetapkan	: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
KESATU	INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG; Mencabut Surat Keputusan Katan R
KEDUA	Tanjungkarang Nomor: W9-U/34/OT.01.2/02/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);  Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Malamatangan
KETIGA	: Tim Penyusun menjalankan tugas sagusi dan keputusan ini.
KEEMPAT	: Memerintahkan kenada masima
KELIMA	mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2024.  Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Tahun Anggaran 2024.
KEENAM	Tanjungkarang Tahun Anggaran 2024;  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 18 Januari 2024 KETUA PENGADILAN TINGGI

TANJUNGKARANG,

HERU PRAMONO

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 49 /KPT.W9-U/SK. OT1.6/I/2024 Tanggal : 18 Januari 2024

# TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

NO	JABATAN	NAMA
1	2	
1.	PENANGGUNG JAWAB	3 Ketua Pengadilan Tinggi Tanjaungkarang
2.	KOORDINATOR VALIDASI DATA	
3.	KETUA	Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H.
4.	SEKRETARIAT	Reno Sigiarto, S.H., M.H.
5.	ANGGOTA	Fajria Eka Agesti, S.Kom., M.M
		Ridho Utama Putra, S.H., M.H
		Margaretha Andreani, S.H.,M.H.
		Sri Kresnawati, S.E.
		Yny Kalia, A.Md.
		Nur Fitria Yulianti, A.Md., SH.
		Sasqia Fakh Rana, A.Md.A.B.
1	I'IM PEREVIU LAPORAN KINERJA	Himawati Kardjono, S.H.
		Sofia Dewi, S.E., M.S.Ak.
		Ganda Mana, S.H., M.H.
	-	M. Yusup, S.H., M.H.
	_	Maryati, S.H., M.H.
1		H Warsito, S.H., M.H.
		Wiranti, S.E., M.M.
		Yopa Gustiawan, S.Kom., M.M.
		Yulita Silvianti Basyrie, S.E., M.M.
		Mohammad Agung Laksono Kholid, S.E., M.H.

Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 18 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG,

HERU PRAMONO

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

## PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

### Pengadilan Tinggi Tanjung Karang



Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Jl. Cut Meutia No. 42 Teluk Betung Utara Telp. 0721481286 Fax. 0721489821 Bandar Lampung - Lampung 35214 e-mail: admin@pt-tanjungkarang.go.id



#### PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

#### **PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

: Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Tempat / Tgl Lahir NIP

: Blitar / 19 November 1961 : 196111191985121001

Pangkat/Gol.Ruang

: Pembina Utama / IV.e

labatan

: Ketua

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya, karena jabatan atau kedudukan saya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan 2. melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya.

Bandar Lampung, 2 Januari 2024

A AMengetahui

Atasan Langsung

Pembuat pernyataan

E1BAALX042139743

H. Bambang Myanto, S.H., M.H. NIP.196805231992121002

Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. NIP.196111191985121001

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Dr. HERU PRAMONO, S.H.,M.Hum

Jabatan

: Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama

: H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Jabatan

: Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

NIP. 196805231992121002

Bandar Lampung, A Januari 2024

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung

Karang 74

Dr. HERU PRAMONO, SH., M. Hum

NIP. 196111191985121001

# RENCANA KINERJA TAHUN 2024

#### RENCANA KINERJA TAHUN 2025 NO. 34.a/KPT.W9-U/RA1.10/I/2024

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95
3.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75
5.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	92
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100

1.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	Anggaran Rp. 31.124.808.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan	Rp.	-
3.	Mahkamah Agung Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	Rp. 256.240.000,-

Bandar Lampung, 4 Januari 2024

Ketua,

Dr. HENLERAMONO, SH., M.Hum

NIP. 196111191985121001

# INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG TAHUN 2024

	SUMBER	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	PENANGGUNG JAWAB	PANITERA	PANITERA	PANITERA
rengabilan imagi lanjung kakang lahun 2024	PENJELASAN	<ul> <li>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu         Jumlah Perkara yang diselesaikan         Jumlah Perkara yang diselesaikan     </li> <li>SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Perta dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat wakt8u adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun waktu berjalan ssuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi  Jumlah Perkara yang Diselesaikan  Catatan:  Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak di ajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.  Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Catatan:  ■ PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara pelayanan Publik.  ■ Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥8
	INDIKATOR KINERJA	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	c. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
	KINERJA UTAMA	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel		
	O <sub>N</sub>	<del>.</del>		

	Laporan Bulanan dan Iaporan Tahunan	
	PANITERA	
	. 100%	April 2021 Perihal
	Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu Jumlah keseluruhan yang dikirim	<ul> <li>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal</li> <li>Pengendalian penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> </ul>
	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengaju tepat waktu	
	. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
I	(1)	

Ditetapkan di : Bandar Lampung

ALETA PERMADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

Dr. Haru Pramono, S.H., M.Hum.